ISSN 1412-2715

Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam

Azhar Syarif, [a, 1, *]
[a] Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148
[1] syarifazhar49@gmail.com
* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history
Received: 20 Juni 2024
Revised 21 Oktober 2024
Accepted 23 November 2024

Keywords
Harta Gono Gini
Perkawinan
Hukum Islam

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the legal concepts underlying the regulation of joint marital property (harta gono gini) and to examine the perspective of Islamic law on the division of this property. The type of research conducted is normative legal research. According to Peter Mahmud Marzuki, normative research is the process of finding legal rules, legal principles, or legal doctrines to address the legal issues faced. The results of this study indicate that the division of joint marital property based on customary law concepts is influenced by the kinship system adopted, which may be matrilineal, patrilineal, or parental customary systems. According to religious legal concepts, for Muslims, the provisions regarding joint marital property are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), while for non-Muslim communities, the provisions of the Civil Code (KUH Perdata) apply. Islamic Sharia law views a clear distinction between the property of husband and wife. The KHI, which is the legal outcome of scholars, considers that the merging of property occurs within marriage using the concept of partnership (syirkah), and acknowledges the existence of joint marital property through the approach of 'urf (customs and traditions). The distribution of joint marital property in the KHI is regulated to be divided equally, which, although lacking a firm basis, fulfills the concept of justice and is an application of the theory of maqashid sharia to protect five basic interests, including the welfare of individuals, property, and descendants of each couple.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum yang mendasari pengaturan harta gono gini dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta gono gini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normative adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian harta gono gini berdasarkan konsep hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem sistem matrilineal, sistem patrilineal atau sistem adat parental. Berdasarkan konsep hukum agama maka bagi orang Islam, berlaku ketentuan harta gono gini yang diatur dalam KHI, sementara itu bagi masyarakat non muslim berlaku ketentuan KUH Perdata. Hukum syariah Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. KHI yang merupakan hasil hukum para ulama memandang bahwa pencampuran harta terjadi dalam perkawinan dengan menggunakan konsep syirkah, dan mengakui keberadaan harta gono gini melalui pendekatan 'urf (adat dan kebiasaan).

Pembagian harta gono gini di dalam KHI diatur dengan dibagi sama rata/seperdua, aturan tersebut walaupun tidak mempunyai dasar tetapi memenuhi konsep keadilan dan merupakan aplikasi dari teori maqashid syariah untuk menjaga lima kemaslahatan pokok diantaranya adalah menjaga kemaslahatan diri, harta dan keturunan masing-masing pasangan.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

1. Pendahuluan

Pada zaman modern ini banyak terjadi di masyarakat bahwa para suami banyak yang mengabaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu realitas yang ada banyak dari para istri yang ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya tidak relevan dengan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya.(Amir Syarifuddin,2007)

Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat pun berubah terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat. Perempuan tidak lagi dianggap tabu untuk berperan dalam masyarakat baik sebagai perkerja paruh waktu sampai menjadi seorang pemimpin. Masa kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarir, baik di pemerintahan maupun di swasta, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Kehidupan modern zaman sekarang tidak lagi membatasi gerak kaum perempuan. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010. Sehingga banyak ditemukan dalam suatu keluarga dimana sepasang suami istri keduanya memiliki profesi pekerjaan dan sama-sama mempunyai penghasilan.

Apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka akan timbul perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap orang-orang yang berkaitan dalam rumah tangga tersebut menyangkut pula terhadap pemabagian harta bersama (gono gini). Pasangan suami istri pada umumnya mempersoalkan pembagian harta gono gini ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan dan dalam proses pengadilannya pun sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono gini. Hal ini dikarenakan, pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumahtangga terkadang tidak terpikirkan sama sekali permasalahan harta gono gini ini.(Besse Sugiswati ,2014)

Di dalam Alquran maupun Hadist tidak dibicarakan tentang harta gono gini, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama,

yang disebut *Syirkah* atau *Syarikah.* Dalam Al-Qur.an Surat An-Nisa Ayat 32 yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama pada saat Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya :

> *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) merupakan legalitas hukum atas ketentuan perkawinan dalam rumah tangga dan penanganan permasalahan di dalamnya termasuk permasalahan harta perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama". Begitu pula Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat KHI) yang menjadi dasar hukum penanganan permasalahan berkaitan dengan kerumah tanggaan khusus untuk umat Islam di Indonesia juga telah mengatur tentang harta bersama di Pasal 85-97. Mengenai pembagian harta gono gini pasca perceraian Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut Hukumnya masing-masing". Sedangkan KHI mengatur pembagian tersebut di Pasal 97 menyebutkan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Ketentuan Pasal 97 KHI menyatakan bahwa harta harus dibagi sama rata antara suami dan istri tetapi menurut penulis pasal tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam lagi. Karena melihat realita yang ada di masyarakat bahwa kondisi rumah tangga berbeda-beda dengan permasalahannya masing-masing. Bisa saja suami yang menjadi sumber pendapatan keluarga yang utama atau bisa saja sebaliknya dimana suami tidak mempunyai penghasilan (tuna karya). Malah yang banyak di masyarakat sekarang adalah suami dan istri keduanya mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan tetapi belum tentu mendapatkan penghsailan yang sama dalam nominal. Sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah konsep pembagian harta gono gini menurut perspektif hukum Islam sehingga bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat .

Beberapa tokoh terkemuka menyampaikan konsep keadilan menurut mereka. Salah satunya Aristoteles, yang menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan. Menurut Bahder Johan

Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama.(Vanya Karunia, 2021)

Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Defisini lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan.

c. Keadilan Natural

Keadilan natural adalah jenis keadilan yang bersifat tetap dan cocok untuk semua kalangan masyarakat. Konsep keadilan ini sering juga disebut keadilan kodrat alam. Prinsip utama dari jenis keadilan ini ialah orang akan diperlakukan sesuai dengan cara ia memperlakukan orang lain. Contohnya jika seseorang suka membantu pihak lain, maka orang tersebut suatu saat nanti juga akan dibantu pihak lain.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah jenis keadilan yang ditetapkan oleh komunitas atau organisasi tertentu. Tujuan penetapan keadilan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan pihak tersebut. Jenis keadilan ini bisa berubah, bergantung pada bentuk pemerintahan suatu negara. Contohnya setiap warga negara wajib membayar biaya jalan tol agar bisa menggunakan fasilitas tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mencoba mengkaji permasalahan tentang harta gono gini:

1. Bagaimana konsep hukum yang mengatur ketentuan harta dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta gono gini pasca perceraian?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal yang masih berkait dengan judul tesis yang penulis kaji serta bahan hukum tersier yang berasal dari artikel-artikel ilmiah pada laman internet hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Hukum Pengaturan Harta Dalam Perkawinan

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, maupun KHI adalah harta bersama. Hanya, istilah gono gini lebih popular dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Konsep dan istilah “gono gini” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Pengertian awal dari gono gini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono gini. (Susanto, 2008) Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono gini (di Jawa), tetapi istilah gono gini lebih populer dan dikenal masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.(Etty Rochaeti, 2015)

Dasar hukum pengaturan harta gono gini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (lnpres No 1 Tahun 1991) (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan KHI). Akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maka Undang-Undang tersebut menggantikan ketentuan perdata tentang perkawinan yang ada pada KUHPerdata.

Menurut Abdul Kadir Muhammad harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang dikuasai bersama oleh suami dan istri dan diperoleh selama perkawinan. Suami maupun istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan

kedua belah pihak. Apabila perceraian terjadi, maka harta bersama ini akan dibagi berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum perdata, dan lain-lain.

2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri, dengan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali suami dan istri menentukan lain dengan membuat perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Demikian pula halnya apabila terjadi perceraian. Maka harta ini dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain;
3. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan membuat perjanjian kawin, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian pula halnya apabila terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pihak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.(Abdulkadir Muhammad, 2000)

Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain di dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 87 Ayat (1) KHI menjelaskan bahwa apa yang dimaksud harta bawaan adalah “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Undang-Undang Perkawinan. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut Hukumnya masing-masing.”. Penjelasan tentang maksud ‘hukumnya masing-masing’ dapat ditemui dalam Bab Pembahasan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.”(Wahjono Darmabrata, 2004)

Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan: "Yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya". Ini menunjukkan bahwa dalam hal pembagian harta gono gini, undang-undang perkawinan memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda.

Menurut Hilman Hadikusuma akibat hukum yang menyangkut harta gono gini berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta gono gini bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta gono gini.(Pradoto , 2017)

Adapun KHI mengenai harta gono-gini dicantumkan dalam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan; yaitu pasal 85 sampai pasal 97. Bunyi pasal 85 mengatakan bahwa: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri".

Kemudian dalam pasal 86 menyebutkan:

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 2000)

Adapun pembagian harta pasca perceraian diatur Pasal 97 KHI yang menyebutkan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.".

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tata cara pembagian harta gono gini setelah bubarnya perkawinan yaitu dibagi sama rata atau seperdua antara suami dan istri. Hal ini berbeda dengan ditemui pada Undang-Undang Perkawinan. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut Hukumnya masing-masing.". Penjelasan tentang maksud 'hukumnya masing-masing' dapat ditemui dalam Bab Pembahasan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya."(Wahjono Darmabrata, 2004)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian

Dalam tinjauan hukum Islam (*Syariah* Islam), tidak dikenal istilah harta gono gini karena menurut hukum Islam pernikahan itu pada asalnya tidak menjadikan harta itu pindah kepemilikan antara suami dan istri. Akad nikah itu sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama-ulama *fiqh*; adalah akad yang membuat laki-laki yang berakad boleh untuk menggauli wanita yang walinya berakad kepada laki tersebut dengan adanya Ijab dan Qabul. Tidak ada dalam akad nikah itu sesuatu yang membuat harta berpindah kepemilikan dari suami ke istri atau dari istri ke suami. Dalam syariah itu yang ada ialah harta istri mutlak untuk istri dan harta suami mutlak kepemilikannya dipegang oleh suami. Penghasilan suami mutlak milik suami namun ia berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya.(Ahmad Zarkasih, 2018) Menurut Ahmad Zarkasih, dalam syariah Islam,

kepemilikan harta itu bisa berubah atau berpindah kepemilikan dengan satu dari 4 cara, yaitu: 1) Waris, 2) Wasiat, 3) Hibah, 4) Jual beli. Tidak ada pencampuran harta diantara mereka, khususnya pada harta-harta bawaan atau harta pribadi yang diperoleh suami dan istri sebelum perkawinan.(Ismuha, 1978)

Dalam hukum syari'at Islam menekankan adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Tidak dikenal istilah harta bersama dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Namun kerja sama atau perkongsian suami istri dalam perkawinan dapat dipandang sebagai *syirkah* yang karenanya dihasilkan harta benda dalam perkawinan mereka. Sifat pencampuran keduanya menyebabkan harta yang diperoleh tidak dapat dibeda-bedakan lagi.(Nurul Najihah, 2017)

Pendapat para pakar hukum Islam menyimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) tidak disebut dalam Alquran maupun hadis. Kedua sumber utama hukum Islam tersebut tidak menyebut secara eksplisit adanya lembaga harta gono gini. Namun demikian, dalam perkembangan hukum Islam konsepsi harta gono gini dikenal dan diakui legitimasinya melalui *qiyas* atau perumpamaan dari usaha bersama atau perkongsian (*syirkah*) suami dan istri, sehingga menghasilkan harta-harta benda (kekayaan) tertentu.(M. Natsir Asnawi, 2020)

Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) setuju untuk mengambil *Syarikah Abdaan* (pengkongsian tenaga) sebagai landasan merumuskan kaedah-kaedah harta gono gini suami istri. Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *Syarikat Abdan Mufawadhah* dengan hukum adat. Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf* (adat istiadat) sebagai sumber hukum dan semakna dengan kaedah *al-adatu muhakkamah* (adat dapat dikukuhkan menjadi hukum).(M.Yahya Harahap,1990)

C. Analisis Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Dalam KHI

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus bagaimana membagi harta gono–gini. Akan tetapi syariah Islam punya praktek legal jika memang terjadi percekcokan antara suami dan istri terkait pembagian harta gono gini ketika perceraian, yaitu dengan *as-sulhu* (perdamaian). Yaitu pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Alquran disebut dengan istilah "*As-sulhu* yaitu "kesepakatan bersama dalam keputusan pembagian." Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Surat *an-Nisa* ayat 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)…".

Pasal 96 dan 97 KHI disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup maka masing-masing pasangan berhak atas seperdua (setengah) dari harta gono gini. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan buah dari ijtihad para pemuka hukum di Indonesia yang berusaha mengunifikasikan hukum Islam untuk digunakan dalam beracara di peradilan tentulah telah melalui pemikiran dan pembahasan yang mendalam dalam mencapai penetapan hukum.

Menurut penulis para perumus KHI tentunya sudah memahami kondisi masyarakat Indonesia yang yang sangat kental dengan adat terlebih lagi konsep harta gono gini juga sebelumnya telah diatur pada KHUPerdata yang lebih dulu ada dibandingkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. maka penetapan dalam Pasal tersebut yang harus dibagi seperdua adalah tidak bertentangan dengan teori *maqashid syari'ah* yang merupakan dasar pemikiran dari terbentuknya hukum hukum Islam.

Sebagaimana uraian di Bab sebelumnya tentang teori *maqashid syari'ah* bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan dan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat maka para ulama *Ushul Fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqashid al- Syari'ah/Maqashid al-Khamsah)* yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kaitannya dengan pembagian harta gono gini dibagi sama rata adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.

Maka dalam konteks harta gono gini, kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta gono gini, dimana istri merupakan pekerja di rumah dan patut mendapatkan upah, atau istri merupakan pekerja yang dalam pekerjaanya istri mendapat upah dari pekerjaannya. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Atau mungkin sebaliknya dimana seorang suami mendapatkan penghasilan yang lebih rendah dari istrinya. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka pasangan tersebut harus bersepakat untuk pembagian yang adil dan menhasilkan kemaslahatan (kebaikan) bersama setelah berpisah.

Disamping itu keharusan untuk membagi sama rata dalam Pasal 97 KHI menurut penulis walaupun tidak mempunyai dalil yang kuat tetapi mempunyai alasan yang benar dengan mengambil jalan musyawarah antara suami istri untuk mencapai *al-sulh*, perdamaian dan kemaslahatan bersama.

4. Simpulan

Pembagian harta gono gini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ialah diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Hal tersebut dikarenakan adat dan budaya di Indonesia yang juga mengandung nilai agama yang lebih dahulu telah lama mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Hukum agama yang dimaksud dapat

dipresesantikan dengan KHI untuk yang beragama Islam dan KUHPerdata untuk yang beragama selain Islam apabila yang bersangkutan mengajukannya ke Pengadilan. Sedangkan hukum adat yang dimaksud ialah pembagian harta gono gini berdasarkan kesepakatan pasangan untuk membagi sesuai dengan aturan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum Islam tidak melihat adanya harta gono gini dalam perkawinan. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Walaupun menurut hukum Islam tidak mengakui adanya harta gono gini (pencampuran harta) tetapi para perumus KHI mengakui adanya harta gono gini dengan menggunakan konsep *syirkah,* dan melalui pendekatan *'urf* (adat dan kebiasaan) sebagai penetapan hukum. Pembagian harta gono gini di dalam KHI diatur dengan dibagi sama rata/seperdua, aturan tersebut secara yuridis merupakan pengejewantahan dari harapan tercapainya keadilan terhadap masing-masing pihak pasca perceraian Disamping itu, teori *maqhashid syariah* dimana *kemaslahatan* merupakan tujuan utamanya sejalan dengan aturan pembagian tersebut karena sesuai dengan misi menjaga lima kemaslahatan pokok diantaranya adalah menjaga kemaslahatan diri, harta dan keturunan masing-masing pasangan.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad I, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

Ahmad Zarkasih, (2018), *Gono-Gini, Antara Adat, Syariat Dan Undang-Undang,* , Rumah Fiqih Publishing : Jakarta Selatan,

Amir Syarifuddin, (2007), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media;

Besse Sugiswati, (2014) "*Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*," Jurnal Perspektif 19, Nomor 3

Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, (2000), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Departemen Agama R.I,

Etty Rochaeti, (2015) *"Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*," Jurnal Wawasan Yuridika 28, Nomor 1

Huzaemah Tahido Yanggo, (2010), *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet-1; Jakarta: Ghalia Indonesa

Ismuha, (1978), *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang,
Kementerian Agama RI, (2010), *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, Cet. I; Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema;

M. Natsir Asnawi, (2020), *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*, Jakarta:Kencana,

M. Yahya Harahap, (1990), *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini; Jakarta,

Nurul Najihah Binti Abdul Rahim, (2017), *Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Muslim Di Selangor (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam)*, Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,

Pradoto, Muhammad Tigas. (2017), *"Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)."* Jurnal Jurisprudence 4.2,

Susanto, Happy. (2008), *Pembagian Harta* Gono Gini *Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia

Vanya Karunia, 2021, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya.* Melalui Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2021/06/02/125545769/Teori-Keadilan-Menurut-Aristoteles-Dan-Contohnya?Page=All [Diakses Pada Tanggal 06/12/2022 Jam 22.00]

Wahjono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, (2004), *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia,